



**RENCANA KERJA  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA TARAKAN  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa' Taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Bedasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023, melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Tarakan, April 2022

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

A R B A I N, SE, M. AP  
NIP. 19680318 199403 1 007

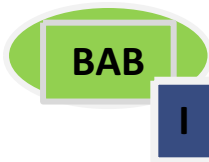
## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan... .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan .....	48
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.</b>	
4.1 Program dan Kegiatan.....	57
4.2 Pendanaan .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>

## Daftar Tabel

1. Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra sd Tahun 2022 .....	12
2. Tabel 2 Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	19
3. Tabel 3 Review Terhadap Rencana Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023.....	28
4. Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	49
5. Tabel 5 Rumusan Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Prakiran Maju Tahun 2024.....	51
6. Tabel 6 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	58

## PENDAHULUAN



### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatl Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

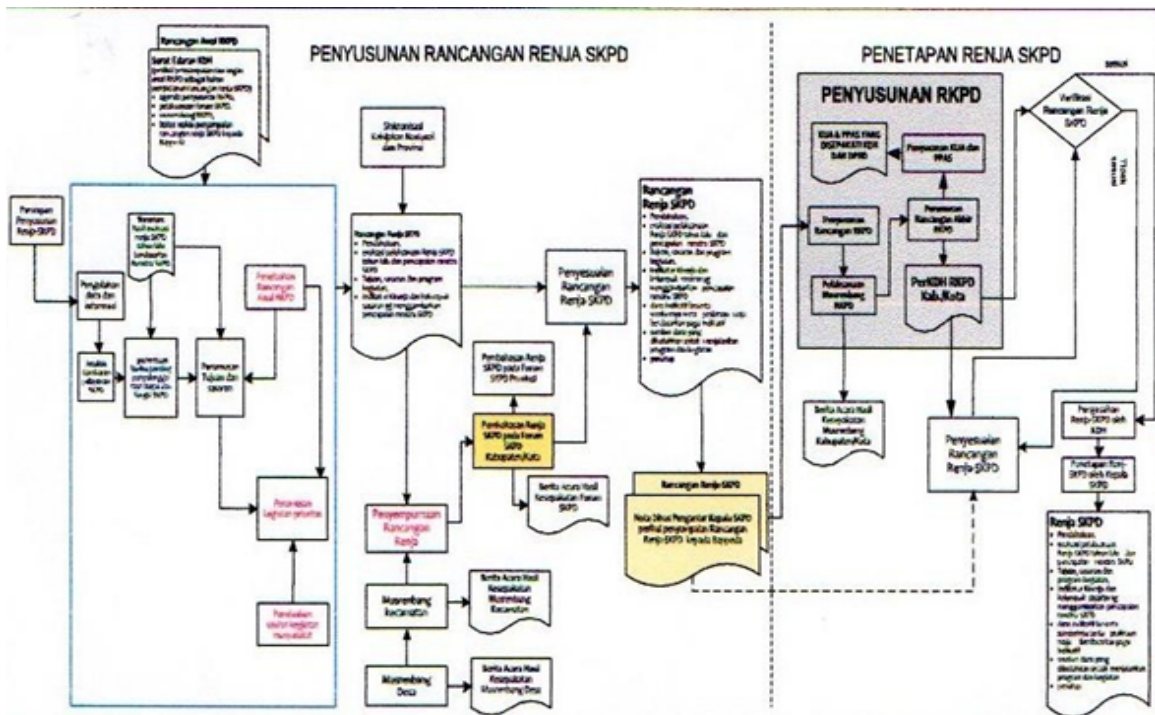
Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan 2023.

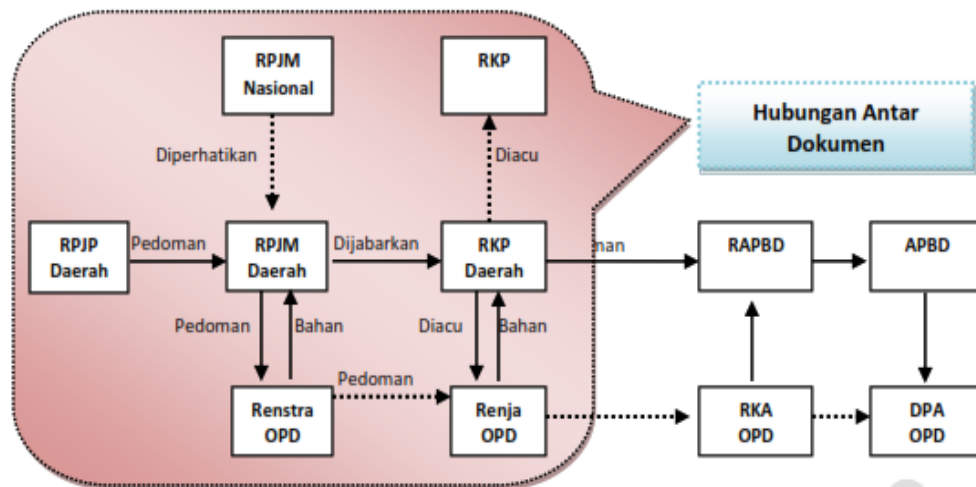
Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;



7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan d Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024

33. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat.

### **1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Good Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2023;
2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Dinas SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.

2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2023;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2023.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

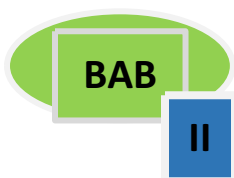
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

### RENSTRA.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2021), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **5.050.173.310,-** dengan realisasi sebesar Rp.**4.624.636.22,-** atau **91,57%**.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada **tabel 1** dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022**

**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1.6.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang terpenuhi</b>	100%	-	100%	90,42%	90,42			
<b>1.6.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>4 Layanan</b>	-	<b>4 Layanan</b>	<b>4 Layanan</b>	<b>100</b>			
1.6.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/Bulan	-	26 Orang	26 Orang	100	26 Orang	25 Orang	23
1.6.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	-	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	10 Orang	22
<b>1.6.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>0 Layanan</b>	-	<b>2 Layanan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>100</b>	<b>0 Layanan</b>	<b>0 Layanan</b>	
1.6.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	0 Unit	



1.6.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Stel	-	1 Stel	1 Stel	100	0 Stel	0 Stel	
<b>1.6.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana</b>	<b>5 Layanan</b>	-	<b>5 Layanan</b>	<b>5 Layanan</b>	100	<b>5 Layanan</b>	<b>5 Layanan</b>	
1.6.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	50 Jenis	-	-
1.6.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	710 item	688 Item	96,90	710 Jenis	-	-
1.6.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	38.000 Lembar	38.000 Lembar	100	38.000 Lembar	-	
1.6.01.2.06.09	. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	-	10 Kali	10 Kali	100	4 Kali	0 Kali	4
<b>1.6.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Aset/BMD yang diadakan</b>	<b>6 Jenis</b>	-	<b>10 Unit</b>	<b>10 Unit</b>	<b>100</b>	-	-	-
1.6.01.2.07.06	Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	-	<b>10 Unit</b>	<b>10 Unit</b>	<b>99,91</b>	6 Unit		28
<b>1.6.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia</b>	<b>5 Layanan</b>	-	<b>5 Layanan</b>	<b>5 Layanan</b>	<b>100</b>	<b>5 Layanan</b>	-	-
1.6.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	180 Lembar	180 Lembar	100	180 Lembar	100 Lembar	28
1.6.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Bulan	12 Bulan	96,70	12 Bulan	3 Bulan	6

1.6.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Aset / BMD yang di pelihara</b>	58 Unit	-	58 Unit	58 Unit	97,43	58 Unit	0 Unit	7
1.6.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	-	10 Unit	10 Unit	96,71	10 Unit	1 Unit	-
1.6.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	96,90	8 Unit	2 Unit	17
1.6.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	-	40 Unit	40 Unit	99,98	40 Unit	3 Unit	-
1.6.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	-	1 Unit	1 Unit	97,65	0 Unit	0 Unit	-
1.6.02	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial</b>	100%	-	100%	-	-	-	-	-
1.6.02.2.02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Penerbitan Izin Sumbangan dan Undian Gratis Berhadiah</b>	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,00	-	-	-
1.6.02.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	200 Orang	200 Orang	75,00	-	-	-
1.6.02.2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial</b>	35 Orang -	-	-	-	-	-	-	-

1.6.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.6.04</b>	<b>Program Rehabilitas Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Terlantar di luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>44,06</b>	<b>44,06</b>	<b>100%</b>	<b>3,92</b>	<b>-</b>
<b>1.6.04.2.01</b>	<b>Rehabilitas sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Terlantar di luar Panti yang di Jangkau</b>	335 Orang	-	328 Orang	<b>44,06</b>	<b>44,06</b>			-
1.6.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	200 Orang	-	200 Orang	105 Orang	52,50	200 Orang	18 Orang	9%
1.6.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	200 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.6.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	41 Orang	-	-	-	-	50 Orang	16 Orang	32%
1.6.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	25 Orang	-	25 Orang	7 Orang	28,00	25 Orang	3 Orang	12%

1.6.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	30 Orang	-	120 Orang	120 Orang	100	30 Orang	-	-
1.6.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	30 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.6.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	7 Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.6.04.2.02</b>	<b>Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya</b>	30 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.6.04.2.02.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	2500 Orang	-	-	-	-	2500 Orang	54 Orang	1%
<b>1.6.05</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial yang dilayani</b>	<b>80%</b>	-	<b>76%</b>	<b>87,59</b>	<b>115,25</b>	<b>80%</b>	-	-
<b>1.6.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang Dimutakhirkan</b>	12550 KPM	-	12.365 KPM	<b>1503 KPM</b>	<b>12,16</b>			-
1.6.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	10000 KPM	-	12.365 KPM	1503 KPM	12,16	10000 KPM	57518 KPM	-
1.6.05.2.02.03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7043 Keluarga	-	3.073 KPM	3.814 KPM	124,11	3.073 KPM	4413 KPM	62,66%

1.6.05.2.02.04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	9460 Orang	-	9.460 KPM	9.268 KPM	97,97	9.460KPM	7.845 KPM	82,93%
<b>1.6.06</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Layanan Penanganan Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>-</b>
1.6.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	-	100%			100%		-
1.6.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	298 Orang	-	298 KK	4 KK	1,34	298 Orang	-	-
<b>1.6.07</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>-</b>
1.6.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	1 TMP	-	1 TMP			1 TMP		-
1.6.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	-	-
<b>2.13.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
<b>2.13.4</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kategori Kelurahan</b>	Cepat Berkembang		Berkembang			Cepat Berkembang		

2.13.4.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kelurahan</b>	<b>20 Kelurahan</b>	-	<b>20 Kelurahan</b>	<b>20 Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>20 Kelurahan</b>		
2.13.4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	-	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100	4 Kelurahan	-	-
<b>2.13.5.</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat yang aktif</b>	100%		100%			100%		
2.13.5.2.01.	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif</b>	<b>76 Lembaga</b>	-	<b>5 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>100</b>	<b>76 Lembaga</b>		
2.13.5.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	-	76 Lembaga	76 Lembaga	100	76 Lembaga	-	-
2.13.5.2.01.4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	-	-	-			-	-

2.13.5.2.01.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	-	-	-			-	-
2.13.5.2.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	-	-	-			-	-
2.13.5.2.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100	25 Dokumen	-	-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Pemberdayaan Sosial

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Persentase Partisipasi PSKS yang memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial, yang mencapai 100 % dari target yang ditentukan yaitu 75% , hal ini disebabkan karena pelaksanaan Sosialisasi terlaksana dengan baik, dengan dukungan kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Realisasi 100%.

#### 2. Program Rehabilitas Sosial

Adapun Capaian Realisasi Program Rehabilitas Sosial dengan Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi Sebesar 100%, hal ini disebabkan karena penanganan kasus orang terlantar banyak dibantu oleh pihak lain termasuk dari paguyuban daerah asal orang terlantar maupun bantuan biaya pemulangan dari BAZNAS Kota Tarakan.

Dengan dukungan Kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan realisasi 50,78%, tidak tercapainya target dalam kegiatan ini disebabkan karena penanganan penyediaan permakanan banyak ditangani oleh pihak lain (BAZNAS Kota Tarakan).
2. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan realisasi 21,61%, tidak tercapainya target dalam kegiatan ini disebabkan karena Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi dilaksanakan apabila bersifat Situasional.



3. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan realisasi 100%, hal ini disebabkan terlaksananya pendampingan dengan baik oleh petugas pendamping.

### 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Adapun Capaian Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator Persentase Perlindungan Sosial yang dilayani, Sebesar 97,14%, hal ini disebabkan karena penangan Perlindungan dan Jaminan Sosial karena penanganannya tepat waktu dan sasaran,

Dengan dukungan Kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 97,29%, Hal ini disebabkan terlaksananya Pendataan Fakir Miskin dengan baik oleh petugas.
2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi 100%, Hal ini disebabkan terlaksananya pendampingan dengan baik oleh petugas pendampingan PKH Kota Tarakan.
3. Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan realisasi 93,90%, hal ini disebabkan terlaksananya kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran.

### 4. Program Penanganan Bencana

Adapun Capaian Realisasi Program Penanganan Bencana dengan Indikator Persentase Layanan Penanganan Bencana Alam dan Sosial, yang mencapai 8,24% dari target yang ditentukan yaitu 100% , hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan di Perlindungan Sosial Korban Bencana, dibantu oleh pihak lain khusus permakanan telah ditangani oleh pihak BAZNAS Kota Tarakan.

#### 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun Capaian Realisasi Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Indikator Persentase Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang mencapai 100 % dari target yang ditentukan yaitu 100% , hal ini disebabkan karena pelaksanaan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan telah tertangani dengan baik.

#### 6. Program Administrasi Pemerintah Desa

Adapun Capaian Realisasi Program Administrasi Pemerintah Desa dengan Indikator Persentase Kategori Kelurahan, Sebesar 100%, hal ini disebabkan karena Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa setiap tahunnya 4 Kelurahan mewakili dari masing-masing Kecamatan yang ada untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat kota mengikuti lomba kelurahan tingkat provinsi hingga nasional.

#### 7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Indikator Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif, Sebesar 100%, hal ini disebabkan karena Kegiatan pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.

Dengan dukungan Kegiatan sebagai berikut

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan realisasi 100%, Hal ini disebabkan terlaksananya kegiatan dengan baik.
2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan realisasi 100%, Hal ini disebabkan terlaksananya kegiatan dengan baik serta tidak adanya kendala dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Sosial dan Pemberayaan Masyarakat Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan evaluasi capaian target kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum sampai dengan tahun 2020 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial serta data perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS di Kota Tarakan, sehingga menghambat kinerja aparatur dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :



**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	2023	2024	9	10	11	2023	2024	12	13	14	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	-	-	80	85.00	90.00	95.00	100	80.98	-	-			101.23	-	-		
2	Persentase PMKS yang tertangani	-	-	-	1.00	1.50	2,00	2,50	3,00	0.84	-	-			84.00	-	-		
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	80.98	-	-			107.97	-	-		
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-			100.00	-	-		
5	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			125.600	-	-		
6	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			-	-	-		
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			133.00	-	-		
8	Rata-rata jumlah binaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	-	-			133.00	-	-		
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberdayakan	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	-	-			133.00	-	-		
10	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	100	-	-			133.00	-	-		
11	Persentase Posyandu aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	-	-	-			-	-	-		
12	Persentase Pemberdayaan Usaha Ekonomi, Lomba Posyantek dan TTG	-	-	-	-	50.00	55.00	60.00	65.00	-	-	-			-	-	-		

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan
  - a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
  - b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kelemahan
  - a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Peluang

a. Adanya perkembangan teknologi informasi.

b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.

c. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

### 4. Ancaman

a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;

b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;

c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi;

d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE					/ Bidang Urusan Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
1	2	3	4	5		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Satuan	Hrg Satuan dlm ribuan (hanya memban tu) nanti di hide	Kebutuhan Dana
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DinsosPM					DinsosPM				
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DinsosPM			5,276,738,000		DinsosPM				5,276,738,000
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DinsosPM			3,715,049,000		DinsosPM				3,750,788,705
1	6	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DinsosPM			3,435,721,000		DinsosPM				3,428,322,787
1	6	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DinsosPM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/b ulan	3,379,675,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DinsosPM	312	Orang/b ulan		3,372,276,787
										Belanja Gaji ASN		25	Orang		
										Belanja TPP ASN		25	Orang		
										Belanja ULP ASN		25	Orang		



1	6	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DinsosPM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	56,046,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DinsosPM	4	Dokumen	56,046,000		
										Belanja Honor ...		12	OB			
										Belanja Honor ...						
1	6	1	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				89,028,000					89,095,918		
1	6	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DinsosPM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DinsosPM	1	Paket	2,499,857		
										Belanja instalasi listrik		55	Buah			
										Belanja ....						
1	6	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DinsosPM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,528,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DinsosPM	2	Paket	50,592,861		
										Belanja ATK, Kebersihan dll		981	Jenis			
										Belanja ....						
1	6	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DinsosPM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DinsosPM	2	Paket	15,003,200		
										Belanja cetak		20084	Lembar			
										Belanja ....						

1	6	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DinsosPM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	21,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DinsosPM	4	Laporan	21,000,000	
										Belanja ....					
										Belanja ....					
1	6	1	2	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DinsosPM			35,000,000		DinsosPM			69,450,000	
1	6	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DinsosPM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35,000,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DinsosPM	8	Unit	69,450,000	
										Belanja Komputer		3	Unit	10,000,000	30,000,000
										Belanja Laptop		2	Unit	15,000,000	30,000,000
										Belanja AC		2	Unit	4,500,000	9,000,000
										Belanja Kipas Angin		1	Unit	450,000	450,000
1	6	1	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DinsosPM			86,300,000		DinsosPM			93,700,000	
1	6	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DinsosPM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,800,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DinsosPM	1	Laporan	1,800,000	
										Belanja ....		180	Lembar	1,800,000	
										Belanja ....					

1	6	1	2 1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DinsosPM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DinsosPM	12	Laporan	91,900,000	
										Belanja ....		12	Bulan	91,900,000	
										Belanja ....					
1	6	1	2 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DinsosPM			69,000,000		DinsosPM			70,220,000	
1	6	1	2 1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DinsosPM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3,000,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DinsosPM	12	Unit	3,000,000	
										Belanja ....					
										Belanja ....					
1	6	1	2 1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DinsosPM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	56,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DinsosPM	8	Unit	57,220,000	
										Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				24,493,000	
										Belanja Suku cadang				19,534,534	
										Belanja pajak				4,692,466	
										Belanja					

										Pemeliharaan						8,500,000	
1	6	1	2	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DinsosPM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	10,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DinsosPM	18	Unit		10,000,000	
											Belanja Pemeliharaan alat kantor		18	Unit		10,000,000	
											Belanja ....						
1	6	2				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	DinsosPM			<b>10,000,000</b>		DinsosPM				<b>9,990,000</b>	
1	6	2	2			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	DinsosPM			10,000,000		DinsosPM				9,990,000	
1	6	2	2	1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10,000,000	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	35	Orang		9,990,000	
											Belanja Makan Minum					4,740,000	
											Belanja Kegiatan kapasitas building		35	Orang		5,250,000	
1	6	4				<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	DinsosPM			<b>210,000,000</b>		DinsosPM				<b>189,329,760</b>	
1	6	4	2			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DinsosPM			160,000,000		DinsosPM				149,780,000	

1	6	4	2	1	Penyediaan Permakanaan	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	60,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	200	Orang	29,370,000
										Belanja makan minum				
										Belanja ....				
1	6	4	2	2	Penyediaan Sandang	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	200	Orang	11,000,000
										Belanja Pakaian dan Kelengkapan Lainnya				
										Belanja ....				
1	6	4	2	3	Penyediaan Alat Bantu	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	41	Orang	50,000,000
										Belanja Alat Bantu		41	Unit	
										Belanja ....				

1	6	4	2	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	25	Orang	30,000,000		
										Belanja ....						
										Belanja ....						
1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DinsosPM	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10,000,000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	30	Orang	10,000,000		
										Belanja Makan dan Minum Kegiatan						
										Belanja ....						
1	6	4	2	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	0	Orang			
										Belanja ....						
										Belanja ....						
1	6	4	2	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	30	Orang	14,054,000		

																	Belanja Kebutuhan Kedaruratan																
																		Belanja ....															
1	6	4	2	1 2	Pemberian Layanan Rujukan	DinsosPM	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	7	Orang					5,356,000														
																	Belanja Transportasi Rujukan																
																	Belanja ....																
1	6	4	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DinsosPM			50,000,000			DinsosPM																					39,549,760
1	6	4	2	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	50,000,000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	2500	Orang																		39,549,760	
																	Belanja Bahan cetak																2,730,160.00
																	Belanja Makan Minum Rapat																15,920,000
																	Belanja Makan Minum pada fasilitas pelayanan																4,200,000
																	Belanja Perjalanan Dinas																16,699,600

1	6	4	2	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	30 Orang	Orang	0	
										Belanja ....					
										Belanja ....					
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	DinsosPM			<b>115,000,000</b>		DinsosPM			<b>99,991,400</b>	
1	6	5	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DinsosPM			115,000,000		DinsosPM			99,991,400	
1	6	5	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DinsosPM	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	75,000,000	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	DinsosPM	10000	Orang	59,999,820	
										Belanja Makan Minum Kegiatan dan DLL	DinsosPM				
										Belanja ....	DinsosPM				
1	6	5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DinsosPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7043 Keluarga	20,000,000	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	7043	Keluarga	20,000,000	
										Belanja ATK	DinsosPM				



										Belanja Makan minum Kegiatan	DinsosPM							
1	6	5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DinsosPM	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460 Orang	20,000,000	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	9460	Orang			19,991,580		
										Belanja Cetak Spanduk / Photo copy	DinsosPM					1,661,580		
										Belanja Monitoring Evaluasi BPNT	DinsosPM					4,830,000		
										Belanja Makan Minum						13,500,000		
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	DinsosPM			<b>70,000,000</b>		DinsosPM					<b>69,999,885</b>		
1	6	6	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DinsosPM			70,000,000		DinsosPM					69,999,885		
1	6	6	2	1	Penyediaan Makanan	DinsosPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	70,000,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	DinsosPM	298	Orang			69,999,885		
										Belanja Makan Minum Penangan Bencana	DinsosPM							
										Belanja ....	DinsosPM							

1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	DinsosPM			<b>77,000,000</b>		DinsosPM				<b>76,950,000</b>	
1	6	7	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DinsosPM			77,000,000		DinsosPM				76,950,000	
1	6	7	2	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DinsosPM	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	77,000,000	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	DinsosPM	1	Makam		76,950,000	
										Belanja Alat dan Perlengkapan TMP (Sapu, Pel, Penyiram tanaman, dll)	DinsosPM				1,786,888.00	
										Belanja Perabot TMP (Taplak Meja, dll)	DinsosPM				1,320,000	
										Belanja Honor Petugas TMP	DinsosPM	3	Orang		48,240,000	
										Belanja Uang makan petugas TMP	DinsosPM				10,980,000	
										Belanja Pemeliharaan taman (Racun rumput, Pupuk, dll)	DinsosPM				1,572,240	
										Belanja alat rumah tangga lainnya (Gorden dan rel gorden)	DinsosPM				4,392,610	
										Belanja Perbaikan Toilet	DinsosPM				8,658,262	

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DinsosPM									
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DinsosPM			1,079,689,000						1,079,688,250
2	#	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DinsosPM			25,000,000						25,000,000
2	#	4	2		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DinsosPM			25,000,000						25,000,000
2	#	4	2	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DinsosPM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen			25,000,000
										Belanja lomba kelurahan	4	Kel			
										Belanja ....					
2	#	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DinsosPM			1,054,689,000						1,054,688,250

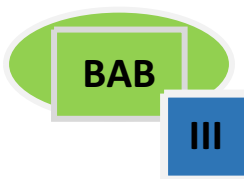
2	#	5	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DinsosPM			1,054,689,000		DinsosPM				1,054,688,250	
2	#	5	2	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DinsosPM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	49,689,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DinsosPM	76 Lembaga		49,688,730	
										Belanja ATK					
										Belanja Makan Minum Kegiatan					

2	#	5	2	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DinsosPM	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Unit	175,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DinsosPM	1	Unit		175,000,000	
										Belanja Rehab Posyandu Sebengkok RT 2,3,4 (Pengganti dana RT)		1	Unit	100,000,000		
										Belanja Sana dan Prasana Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Kaur, Bantal, Kursi plastik, Timbangan, Peralatan/Peralatan makan	DinsosPM	1	Paket	75,000,000		
2	#	5	2	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DinsosPM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DinsosPM	1	Dokumen		24,999,760	
										Belanja ATK						
										Belanja Makan minum						

										Belanja Honorarium								
2	#	5	2	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DinsosPM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	25,000,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DinsosPM	1	Laporan				24,999,760	
										Belanja ATK								
										Belanja Makan minum								
										Belanja Honorarium								
2	#	5	2	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DinsosPM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	780,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DinsosPM	25	Dokumen				780,000,000	
										Belanja Hibah								
										Belanja ....								
									5,276,738,000									5,276,738,000

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2023 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.



## TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2023 merupakan tahun keempat pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023.

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.**

#### **A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan COVID-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.



Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## B.ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2027 : “ **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” tema pembangunan Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi hebat akibat pandemi Covid-19. Selaras dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP tersebut diatas maka sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) Indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada nilai tukar petani dan nilai nelayan dengan indikator pembangunan sebagaimana tabel berikut :

### Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9 %
Inflasi	2,0-4,0 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3-6,0 %
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5 %
Rasio Gini (Nilai)	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,02
“menuju target 29% pada 2030 (Paris Agreement)”	
Nilai Tukar Petani/NTP(Nilai)	103-105
Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai)	106-107

### C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah Pemerintah dalam hal ini Bappenas telah menetapkan tema RKP 2023 yakni **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Selanjutnya tema tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan dengan tema pembangunan di daerah masing-masing. Sedangkan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 adalah 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) seperti gambar dibawah ini :



Dalam rangka pencapaian tema RKP tersebut diatas, maka ketujuh prioritas di atas difokuskan pada sector pertanian, industry pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan system keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan system logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi dan ekonomi hijau.

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2023 merupakan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

### **PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Sasaran PN 1 sebagai berikut:

- a. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya; dan
- b. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB

### **PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Sasaran PN 2 sebagai berikut:

- a. meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI; dan
- b. terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

### **PN 3.Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Sasaran PN 3 sebagai berikut:

- a. terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- c. terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi *stunting*, (b) insiden *tuberculosis*, (c) angka kematian ibu, (d) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (e) persentase merokok usia 10-18 tahun, (f) meningkatkan nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (g) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (h) harapan lama sekolah;
- d. meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- e. meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; dan
- f. meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

### **PN 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Sasaran PN 4 sebagai berikut:

- a. menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- b. meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

- c. meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- d. menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- e. meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan; dan
- f. meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

#### **PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Sasaran PN 5 sebagai berikut:

- (1) meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, persen), dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010);
- (2) meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*);
- (3) meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- (4) meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi dan (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita); dan
- (5) meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

#### **PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Sasaran PN 6 sebagai berikut:

- (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

dan

- (3) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK dan (b) peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional.

## **PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Sasaran PN 7 sebagai berikut:

- (1) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota); dan
- (5) terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

## **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023**

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun pertama. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau focus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 :

**“Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai  
Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”**

Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi:

- (1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan

pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) industri ketenagalistrikan; (4) industri perdagangan dan jasa; (5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. Karena, industri-industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Tema ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 yang diarahkan untuk mewujudkan 10 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Prioritas pembangunan ini merupakan prioritas dalam RPJMD yang akan diwujudkan pada akhir periode yaitu tahun 2023. Adapun **10 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**, meliputi :

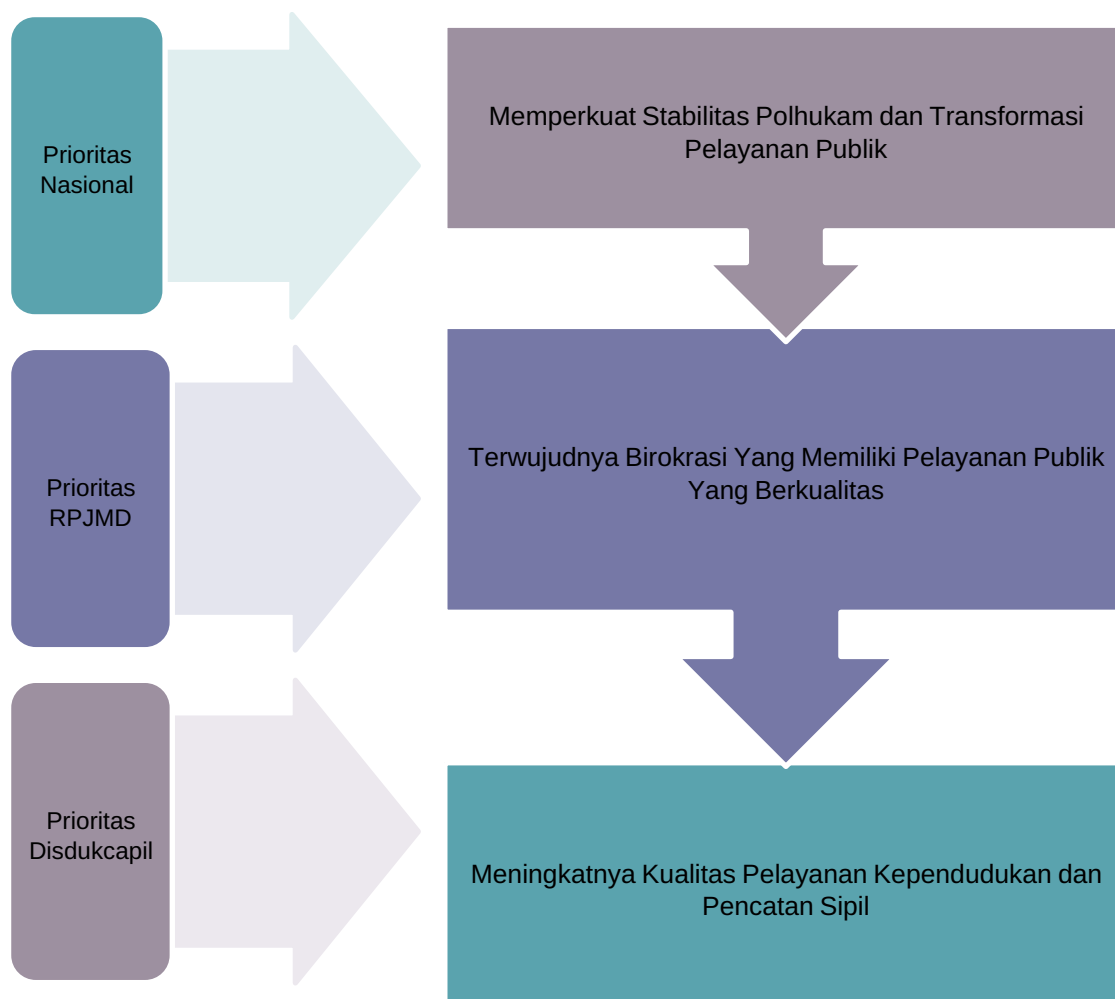
1. Pembangunan PLTA sungai Mentarang dan sungai kayan
2. Pembangunan Kawasan Industri dan pelabuhan internasional
3. Penguatan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dan arti luas dan jaminan perlindungan kepada peteni, nelayan dan petani tambak disetiap Kabupaten / Kota
4. Penguatan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata Kota di setiap Kabupaten/Kota
5. Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di Kabupaten/Kota
6. Pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif disetiap Kabupaten/Kota
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan
8. Pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial
9. Pengelolaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM disetiap Kabupaten/Kota
10. Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan 10 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ditujukan untuk mendorong terwujudnya target-target sasaran pembangunan. Pembangunan Tahun 2023



menjadi sangat penting bagi Provinsi Kalimantan Utara sebab merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk itu penyusunan RKPD Tahun 2023 harus disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya dan kondisi terkini, termasuk permasalahan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Membedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 selain untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah, juga untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.



### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan telaah Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2014-2019, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam rangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang terfokus pada

tindakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Indikator Sasaran dalam periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial.
4. Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran pembangunan Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja sama pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4 ;

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran Tahun 2023**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET AWAL RENSTR A	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	74,25	78,00	80,00	82,00	84,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pengelolaan TMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Terlatih	41,00	46,00	50,00	65,00	75,00
			Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	97,00	98,00	99,00	100,00
			Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG)	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Persentase tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	-	61,00 / B	66,00 / B	70,00 / B	72,00 / B

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 5** adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		Tarakan		4.197.049.750	APBD			4.155.440.000
1	06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		Tarakan		4.197.049.750	APBD			4.155.440.000
1	06 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang terpenuhi	Tarakan	100%	3.750.788.705	APBD		100%	3.713.440.000
1	06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	Tarakan	4 Layanan	3.428.322.787	APBD		4 Layanan	3.435.721.000
1	06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	312 Orang/Bulan	3.372.276.787	APBD		312 Orang/Bulan	3.379.675.000
1	06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	4 Dokumen	56.046.000	APBD		4 Dokumen	56.046.000
1	06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Tarakan	5 Layanan	89.095.918	APBD		5 Layanan	87.419.000
1	06 01 2.06 01 Penyediaan Komonen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komonen Instalasi	Tarakan	1 Paket	2.499.857	APBD		1 Paket	2.500.000

					<b>Bangunan Kantor</b>	<b>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>							
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik dan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tarakan	2 Paket	50.592.861	APBD		2 Paket	48.919.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tarakan	2 Paket	15.003.200	APBD		2 Paket	15.000.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	4 Laporan	21.000.000	APBD		4 Laporan	21.000.000
1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	Tarakan	6 Jenis	69.450.000	APBD		6 Jenis	35.000.000
1	06	01	2.07	06	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tarakan	8 Unit	69.450.000	APBD		8 Unit	35.000.000
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	Tarakan	5 Layanan	93.700.000	APBD		5 Layanan	86.300.000
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	1 Laporan	1.800.000	APBD		1 Laporan	1.800.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarakan	12 Laporan	91.900.000	APBD		12 Laporan	84.500.000
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	Tarakan	10 Unit	70.220.000	APBD		10 Unit	69.000.000

1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarakan	10 Unit	3.000.000	APBD		10 Unit	3.000.000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Blaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tarakan	8 Unit	57.220.000	APBD		8 Unit	56.000.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tarakan	18 Unit	10.000.000	APBD		18 Jenis	10.000.000
1	06	02			<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	Tarakan	100%	9.990.000	APBD		0	0
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Tarakan	25 Orang	9.990.000	APBD		0	0
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	35 Orang	9.990.000	APBD		100%	0
1	06	04			<b>Program Rehabilitas Sosial</b>	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan	Tarakan	100%	189.329.760	APBD		100%	200.000.000



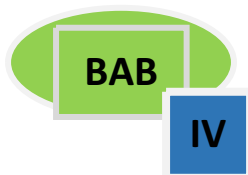
						dasarnya							
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	Tarakan	335 Orang	149.780.000	APBD		335 Orang	150.000.000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	200 Orang	29.370.000	APBD		100%	50.000.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	200 Orang	11.000.000	APBD		100%	0
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	41 Orang	50.000.000	APBD		100%	50.000.000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	25 Orang	30.000.000	APBD		100%	30.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	30 Orang	10.000.000	APBD		100%	10.000.000

1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	30 Orang	14.054.000	APBD		100%	10.000.000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Tarakan	7 Orang	5.356.000	APBD		100%	0
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	Tarakan	100%	39.549.760	APBD		100%	50.000.000
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	2500 Orang	39.549.760	APBD		100%	50.000.000
1	06	05			<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani</b>	Tarakan	78%	99.991.400	APBD		80%	115.000.000
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani</b>	Tarakan	12550 KPM	99.991.400	APBD		12550 KPM	115.000.000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Tarakan	10000 Orang	59.999.820	APBD		78%	75.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	7043 Keluarga	20.000.000	APBD		78%	20.000.000

1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	9460 Orang	19.991.580	APBD		78%	20.000.000
1	06	06			<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial</b>	Tarakan	100%	69.999.885	APBD		100%	50.000.000
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah</b>	Tarakan	100%	69.999.885	APBD		100%	50.000.000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	298 Orang	69.999.885	APBD		100%	50.000.000
1	06	07			<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan</b>	Tarakan	100%	76.950.000	APBD		100%	77.000.000
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	Tarakan	1 Makam	76.950.000	APBD		100%	77.000.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 Makam	76.950.000	APBD		100%	77.000.000
2	13				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	-	Tarakan	-	1.079.689.000	-	-	-	871.932.000

2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	Tarakan	Cepat Berkembang	25.000.000	APBD		Cepat Berkembang	25.000.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	Tarakan	20 Kelurahan	25.000.000	APBD		20 Kelurahan	25.000.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tarakan	1 Dokumen	25.000.000	APBD		Cepat Berkembang	25.000.000
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Tarakan	100%	1.054.688.250	APBD		100%	846.932.000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	Tarakan	76 Lembaga	1.054.688.250	APBD		76 Lembaga	846.932.000

2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tarakan	<b>76 Lembaga</b>	159.688.730	APBD		<b>100%</b>	49.689.000
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	20 Unit	175.000.000	APBD		100%	75.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tarakan	1 Dokumen	24.999.760	APBD		100%	25.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tarakan	1 Laporan	24.999.760	APBD		100%	25.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	3 Dokumen	780.000.000	APBD		100%	672.243.000



## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2023. Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 di susun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

### 4.2. PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2023.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam **tabel 6** sebagai berikut :

**TABEL. 6**  
**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output/Outcome	Target Kinerja Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
				Target	Rp	
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3.750.788.705	Sekretariat
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.428.322.787	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/Bulan	3.372.276.787	
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	56.046.000	
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	5 Layanan	89.095.918	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.499.857	
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.592.861	
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.003.200	
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	21.000.000	
		3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	-	69.450.000	
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	69.450.000	
		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	5 Layanan	93.700.000	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	

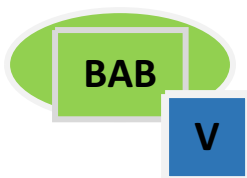
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.900.000	
			5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara</b>	-	<b>70.220.000</b>	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	3.000.000	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	57.220.000	
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	10.000.000	
<b>Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	<b>1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>1. Persentase Partisipasi PSKS yang Terlatih</b> <b>2. Persentase Penerbitan izin dan rekomendasi</b>	<b>65%</b> <b>100%</b>	<b>9.990.000</b>	<b>Bidang Sosial</b>
			1	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial</b>	<b>25 Orang</b>	<b>9.990.000</b>	
			1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Orang	9.990.000	
	<b>2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis diluar Panti</b>	<b>3</b>	<b>Program Rehabilitas Sosial</b>		<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya</b>	<b>100%</b>	<b>189.329.760</b>	<b>Bidang Sosial</b>
			1	<b>Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau</b>	<b>335 Orang</b>	<b>149.780.000</b>	
			1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	29.370.000	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan			



			2	Penyediaan Sandang	Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	11.000.000	
			3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	50.000.000	
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000	
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000	
			6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	14.054.000	
			7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	5.356.000	
			2	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya</b>	<b>100%</b>	<b>39.549.760</b>	
			1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	39.549.760	
	<b>3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>4</b>	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>		<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dilayani</b>	<b>78%</b>	<b>99.991.400</b>	<b>Bidang Sosial</b>
			1	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang Dimutakhirkan</b>	<b>12550 KPM</b>	<b>99.991.400</b>	
			1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	59.999.820	

			2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7043 Keluarga	20.000.000	
			3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460 Orang	19.991.580	
	<b>4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>5</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>69.999.885</b>	<b>Bidang Sosial</b>
			1	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah</b>	100%	<b>69.999.885</b>	
			1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	69.999.885	
	<b>5. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>6</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		<b>Persentase Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100%</b>	<b>76.950.000</b>	<b>Bidang Sosial</b>
			1	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>1 TMP</b>	<b>76.950.000</b>	
			1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	76.950.000	
<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	<b>1.Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>7</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Kategori kelurahan</b>	<b>Cepat Berkembang</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
			1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kelurahan</b>	<b>20 Kelurahan</b>	<b>25.000.000</b>	
			1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	
		<b>8</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>1.Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</b> <b>2.Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Posyantek,Pengiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG)</b>	<b>99%</b> <b>70%</b>	<b>1.054.688.250</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>

			<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif</b>	<b>76 Lembaga</b>	<b>1.054.688.250</b>	
			1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	49.688.730	
			2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	175.000.000	
			3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	24.999.760	
			4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	24.999.760	
			5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	780.000.000	



## PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi Kepala Daerah Periode 2019-2024 yaitu ” **Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City** ”.

Tarakan, April 2022

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

A R B A I N, SE, M. AP

NIP.19680318 199403 1 007